



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12  
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 telah diatur mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62020), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan BPTSP meliputi seluruh perizinan dan non perizinan di bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perhubungan;
  - g. lingkungan hidup;
  - h. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - j. sosial;
  - k. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - l. koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
  - m. penanaman modal;
  - n. kebudayaan dan pariwisata;
  - o. kepemudaan dan olahraga;
  - p. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - q. perpustakaan;
  - r. komunikasi dan informatika;
  - s. pertanian dan ketahanan pangan;
  - t. kehutanan;
  - u. energi dan sumber daya mineral;
  - v. kelautan dan perikanan;
  - w. peternakan;
  - x. perdagangan;
  - y. perindustrian; dan
  - z. pembangunan.
- (2) Selain pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan dan non perizinan yang ditentukan kemudian setelah Peraturan Gubernur ini termasuk dalam kewenangan BPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertingkat antara Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.
- (2) Jenis kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dapat dilimpahkan kepada KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.
  - (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :
    - a. beban kerja;
    - b. kompleksitas keteknisan;
    - c. sumber daya;
    - d. efektivitas dan efisiensi;
    - e. prasarana dan sarana; dan
    - f. sistem teknologi informasi penyelenggara PTSP.
  - (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BTPSP.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15A

- (1) Penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan pengelompokan perizinan/non perizinan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Pelayanan administrasi yang dilimpahkan ke Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan adalah pelayanan administrasi selain bidang pertanahan, perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil serta legalisasinya.
- (2) Tata cara permohonan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.
- (3) Pelayanan administrasi dibidang pertanahan, perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Camat dan Lurah, penyelenggaraannya ditempatkan pada Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.

- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk penerimaan permohonan dan penyerahan hasil pelayanan administrasi.
6. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2016

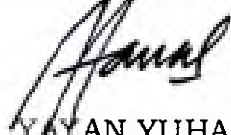
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72006

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
 Nomor 7 TAHUN 2016  
 Tanggal 8 Januari 2016

**JENIS SERTA KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
<b>A.</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>						
1	Izin Prinsip Taman Kanak-kanak					✓	
2	Izin Operasional Taman Kanak-kanak					✓	
3	Izin Prinsip Sekolah Dasar					✓	
4	Izin Operasional Sekolah Dasar					✓	
5	Izin Prinsip Pendidikan Inklusi		✓				
6	Izin Operasional Pendidikan Inklusi		✓				
7	Izin Prinsip Sekolah Menengah Pertama				✓		
8	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama				✓		
9	Izin Prinsip Sekolah Menengah Atas		✓				
10	Izin Operasional Sekolah Menengah Atas		✓				
11	Izin Prinsip Sekolah Menengah Kejuruan		✓				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
12	Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan			✓			
13	Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama TK			✓			
14	Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama SD			✓			
15	Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama SMP			✓			
16	Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama SMA			✓			
17	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus			✓			
18	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan				✓		
19	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini				✓		
20	Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis					✓	
21	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar				✓		
22	Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal			✓			
<b>B. Kesehatan</b>							
1	Izin Operasional Perusahaan Pengendalian Hama (Pest Control)			✓			
2	Izin Penyelenggaraan Optikal				✓		



No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
3	Izin Operasional RS Kelas B Non Pendidikan	✓					
4	Izin Operasional RS Kelas C	✓					
5	Izin Operasional RS Kelas D	✓					
6	Izin Klinik Utama		✓				
7	Izin Klinik Pratama			✓			
8	Izin Laboratorium Klinik Swasta Tipe Madya		✓				
9	Izin Laboratorium Klinik Swasta Tipe Pratama		✓				
10	Izin Institusi Penguji Kalibrasi Alat Kesehatan	✓					
11	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (di Fasilitas Kesehatan)					✓	
12	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (Praktik Perorangan)					✓	
13	Izin Sarana Upaya Pelayanan Hemodialisa di Dalam Rumah Sakit	✓					
14	Izin Toko Alat Kesehatan				✓		
15	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		✓				
16	Izin Apotek				✓		
17	Izin Apotek Rakyat				✓		
18	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional				✓		



No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
19	Izin Pedagang Eceran Obat				✓	
20	Izin Praktik Dokter Umum (Praktik Perorangan)				✓	
21	Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas Kesehatan)				✓	
22	Izin Praktik Dokter Gigi (Praktik Perorangan)				✓	
23	Izin Praktik Dokter Gigi (di Fasilitas Kesehatan)				✓	
24	Izin Praktik Dokter Spesialis (Praktik Perorangan)			✓		
25	Izin Praktik Dokter Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)			✓		
26	Izin Praktik Perawat (Praktik Perorangan)				✓	
27	Izin Praktik Perawat (di Fasilitas Kesehatan)				✓	
28	Izin Praktik Bidan (Praktik Perorangan)				✓	
29	Izin Praktik Bidan (di Fasilitas Kesehatan)				✓	
30	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kesehatan)				✓	
31	Izin Praktik Apoteker			✓		
32	Izin Praktik Refraksionis Optisien (di Fasilitas Kesehatan)		✓			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
33	Izin Praktik Fisioterapis (di Fasilitas Kesehatan)		✓				
34	Izin Praktik Terapi Wicara (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
35	Izin Praktik Radiografer (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
36	Izin Praktik Penata Anestesi (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
37	Izin Praktik Perawat Gigi (di Fasilitas Kesehatan)				✓		
38	Izin Praktik Okupasi Terapi (di Fasilitas Kesehatan)		✓				
39	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis			✓			
40	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Praktik Perorangan)			✓			
41	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
42	Izin Praktik Sanitarian (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
43	Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat			✓			
44	Izin Praktik Tenaga Gizi (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
45	Izin Praktik Teknisi Gigi (di Fasilitas Kesehatan)			✓			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
46	Izin Praktik Teknisi Elektromedis (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
47	Izin Praktik Ortotik Prostetik (di Fasilitas Kesehatan)		✓				
48	Izin Praktik Perkam Medis (di Fasilitas Kesehatan)		✓				
49	Izin Praktik Fisika Medik (di Fasilitas Kesehatan)			✓			
50	Izin Puskesmas Kecamatan		✓				
51	Izin Puskesmas Kelurahan			✓			
52	Izin Panti Pengobat Tradisional				✓		
53	Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional				✓		
54	Izin Ahli Kecantikan				✓		
55	Izin Salon Kecantikan				✓		
56	Tanda Daftar Penyehat Tradisional (di Fasilitas Kesehatan)				✓		
57	Tanda Daftar Penyehat Tradisional (Praktik Perorangan)				✓		
58	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	✓					

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
59	Rekomendasi Laboratorium Klinik Swasta Tipe Utama	✓					
60	Rekomendasi Industri Farmasi	✓					
61	Rekomendasi Industri Obat Tradisional	✓					
62	Rekomendasi Produksi Kosmetik	✓					
63	Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan	✓					
64	Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan	✓					
65	Rekomendasi Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	✓					
66	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi	✓					
67	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi yang Mendistribusikan Psikotropika	✓					
68	Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang)	✓					
69	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan	✓					
70	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan	✓					
71	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		✓				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
72	Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga			✓			
73	Sertifikat Laik Sehat Usaha Depo Air Minum			✓			
74	Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan		✓				
75	Surat Keterangan Laik Sehat Usaha Pangan Rumah Tangga			✓			
76	Izin Ambulans		✓				
77	Izin Tukang Gigi				✓		
<b>C. Pekerjaan Umum</b>							
1	Izin Pelaksanaan Storing Jaringan Utilitas			✓			
2	Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap			✓			
3	Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas		✓				
4	Izin Membangun Prasarana		✓				
5	Izin Peil Lantai Bangunan		✓				
6	Izin Pembangunan Prasarana Reklamasi		✓				
7	Izin Pemanfaatan Air Permukaan		✓				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
8	Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan		✓				
9	Izin Usaha Pemusnahan/Pemanfaatan Sampah dan Air kotor		✓				
10	Izin Usaha Pengelolaan Sampah		✓				
11	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film, Bazar, Perlombaan, dan Kegiatan Lain				✓		
12	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Perkemahan				✓		
13	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet), Material dan sejenisnya				✓		
14	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk titik lubang tiang umbul-umbul				✓		
15	Izin Penebangan Pohon Pelindung				✓		
16	Izin Penggunaan Bangunan di lokasi Taman dan Jalur Hijau				✓		

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
17	Izin Pemakaian lokasi kebun bibit Dinas Pertamanan dan Pemakaman				✓		
18	Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman untuk Shooting Film				✓		
19	Izin mengangkut Jenazah ke Luar Negeri				✓		
20	Izin Mengangkut Jenazah ke Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta				✓		
21	Izin Tahan Jenazah				✓		
22	Izin Pengabuan Jenazah/Kerangka				✓		
23	Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman		✓				
24	Izin Usaha Angkutan Jenazah		✓				
25	Izin Usaha/Yayasan Rumah Abu		✓				
26	Izin Usaha/Yayasan Rumah Duka		✓				
27	Izin Usaha Krematorium (Pengabuan)		✓				
28	Izin Penggunaan Tanah Makam				✓		
29	Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan				✓		



No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
	30	Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah/Kerangka Jenazah				✓	
<b>D. Perumahan</b>							
	1	Izin Rumah Kost				✓	
	2	Izin Perumahan	✓				
<b>E. Penataan Ruang</b>							
	1	Peta Situasi Ukur/Pengukuran Lahan	Luas tanah > 5000 m <sup>2</sup>	Luas tanah 500 - 5000 m <sup>2</sup>	Luas tanah < 500 m <sup>2</sup>		
	2	Ketetapan Rencana Kota Besar	Tanah berukuran > 5000m <sup>2</sup> ; untuk semua jenis bangunan baik rumah tinggal maupun non-rumah tinggal				
	3	Ketetapan Rencana Kota Sedang		Tanah berukuran 1000m <sup>2</sup> s/d 5000m <sup>2</sup> ; untuk semua jenis bangunan baik rumah tinggal maupun non-rumah tinggal			
	4	Ketetapan Rencana Kota Kecil			Tanah berukuran < 1000m <sup>2</sup> , untuk semua jenis bangunan baik rumah tinggal maupun non-rumah tinggal		
	5	Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD	✓				
	6	Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Kelas A	Bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya lebih dari 8.				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
7	Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur Kelas B		Bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya kurang dari 8.				
8	Cetak Ulang Peta atau Gambar	Luas tanah > 5000 m <sup>2</sup>	Luas tanah 500 - 5000 m <sup>2</sup>	Luas tanah < 500 m <sup>2</sup>			
9	Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas	✓					
10	Persetujuan Prinsip Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	✓					
11	Izin Penunjukan Penggunaan Tanah	✓					
12	Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Tanah	✓					
13	Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A		Berukuran > 24m <sup>2</sup> , atau memiliki LED, atau berada di Kawasan Kendali Ketat				
14	Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas B		Berukuran < 24m <sup>2</sup> , memiliki TLB BR, dan berada di luar Kawasan Kendali Ketat.				
15	Izin Penyelenggaraan Reklame Kelas C			Tidak memiliki TLB BR (Tata Letak Bangunan, Bangunan Reklame)			
16	Persetujuan Prinsip Penyelenggaraan Reklame untuk kawasan kendali ketat	✓					
17	Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta	✓					

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
18	Izin Usaha Jasa Konstruksi Besar	✓					
19	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kecil dan Menengah		✓				
20	Persetujuan Prinsip Jembatan Penyeberangan Orang, Jembatan Penyeberangan Multiguna, Terowongan Penyeberangan Orang	✓					
21	Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan Tinggi	✓					
22	Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi		✓				
23	Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Menara	✓					
24	Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame	✓					
<b>F.</b>	<b>Perhubungan</b>						
1	Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal		✓				
2	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Izin Baru	Izin Perpanjangan				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satiak PTSP Kecamatan	Kepala Satiak PTSP Kelurahan	
3	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	Izin Baru	Izin Perpanjangan				
4	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang	✓					
5	Pertimbangan Teknis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi	✓					
6	Pertimbangan Teknis Angkutan Pariwisata	✓					
7	Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum	✓					
8	Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	✓					
9	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri pelabuhan pengumpan	✓					
10	Izin Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan	✓					
11	Izin Pemanfaatan Perairan di Luar Pelabuhan	✓					

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
12	Izin Pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan industri dan pemotongan kapal, pariwisata, kepelabuhanan, floating repair, floating terminal, floating storage	✓					
13	Izin Usaha Angkutan Perairan	✓					
14	Izin Usaha Bongkar Muat Barang	✓					
15	Izin Usaha Depo Peti Kemas	✓					
16	Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	✓					
17	Izin Usaha Jasa Tally	✓					
18	Izin Usaha Pelayaran Rakyat	✓					
19	Izin Agen Penjualan Tiket Pesawat Udara				✓		
20	Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan		✓				
21	Rekomendasi Pas Kapal Besar	✓					
22	Rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan)	✓					
23	Izin Pool	✓					
24	Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas	✓					

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
25	Izin Penyelenggaraan	Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan	✓				
26	Izin penjualan tiket dan pemberangkatan bus dari pool	Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	✓				
27	Izin angkutan barang untuk melewati jalan-jalan tertentu		✓				
28	Izin insidental (angkutan lebaran)		✓				
29	Izin pemasangan menara pasang surut		✓				
30	Izin Usaha Angkutan	Penyeberangan		✓			
<b>G. Lingkungan Hidup</b>							
1	Izin Lingkungan - Analisis	Mengenai Dampak Lingkungan	✓				AMDAL khusus untuk Pulau Seribu dan reklamasi Pantai Utara Jakarta
2	Izin Lingkungan - Upaya	Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kelas A (UKL UPL Kelas A)	✓				Untuk izin lingkungan yang dahulu membutuhkan AMDAL yang tidak termasuk kegiatan di pulau seribu dan reklamasi pantai utara Jakarta
3	Izin Lingkungan - Upaya	Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kelas B (UKL UPL Kelas B)		✓			

No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
4	Persetujuan KA ANDAL	✓				
5	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	✓				
6	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	✓				
7	Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi	✓				
8	Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Untuk Pengecer	✓				
9	Rekomendasi Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional	✓				
10	Izin Pembuangan Air Limbah	✓				
11	Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah	✓				
12	Pengesahan Pemakaian dan Pengolahan Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja	✓				
13	Izin Pengeboran Air Tanah	✓				
14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor	✓				
15	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek	✓				
16	Izin Kartu Juru Bor	✓				



No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
17	Izin Kartu Pengenal Instalasi Bor	✓					
18	Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah	✓					
19	Izin Dewatering	✓					
20	Izin Lingkungan - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan		✓				
21	Izin Operasional Concrete Batching Plant		✓				
22	Izin pemanfaatan air baku	✓					
H.	Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah						
1	Izin Mendirikan Bangunan Kelas A	Bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya di atas 8 lantai					
2	Izin Mendirikan Bangunan Kelas B		Bangunan non-rumah tinggal atau perumahan real estate atau rumah yang merupakan pemugaran cagar budaya, yang jumlah lantainya di bawah 8 lantai.				
3	Izin Mendirikan Bangunan Kelas C			Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah < 1000m <sup>2</sup> , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai sampai dengan 3 lantai.			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
4	Izin Mendirikan Bangunan Kelas D					Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah < 100m <sup>2</sup> , kondisi tanah kosong atau di atasnya terdapat bangunan tua yang akan dibongkar, dan jumlah lantainya sampai dengan 2 lantai.	
5	Sertifikat Layak Fungsi Kelas A	Bangunan non-rumah tinggal yang jumlah lantainya di atas 8 lantai.					
6	Sertifikat Layak Fungsi Kelas B		Bangunan non-rumah tinggal atau perumahan real estate atau rumah yang merupakan pemugaran cagar budaya, yang jumlah lantainya di bawah 8 lantai.				
7	Sertifikat Layak Fungsi Kelas C				Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah < 1000m <sup>2</sup> , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai sampai dengan 3 lantai.		
8	Sertifikat Layak Fungsi Kelas D					Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah < 100m <sup>2</sup> , kondisi tanah kosong atau di atasnya terdapat bangunan tua yang akan dibongkar, dan jumlah lantainya sampai dengan 2 lantai.	
9	Izin Pelaku Teknis Bangunan		✓				
10	Persetujuan Rencana Teknis Bongkar		✓				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
11	Izin Loading Test	✓					
12	Izin Ground Breaking	✓					
13	Rekomendasi Perolehan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di atas bidang tanah Hak Pengelolaan	✓					
14	Rekomendasi Peralihan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di atas bidang tanah Hak Pengelolaan	✓					
15	Penjaminan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya diatas bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan	✓					
16	Permohonan Hak diatas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja	✓					
<b>I.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
<b>J.</b>	<b>Sosial</b>						
1	Tanda Daftar Perkumpulan/Organisasi Sosial					✓	
2	Tanda Daftar Yayasan					✓	
3	Izin Kegiatan Yayasan					✓	

No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
4	Izin Pendirian Panti Sosial				✓	
5	Izin Pendirian Non Panti Sosial				✓	
6	Izin Pendirian Pusat Santunan Dalam Keluarga				✓	
7	Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra				✓	
8	Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing		✓			
9	Izin Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang			✓		
10	Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial		✓			
11	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	✓				
<b>K.</b>	<b>Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian</b>					
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja			✓		
2	Izin Lembaga Pelatihan Kerja atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri			✓		
3	Izin kelayakan tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia			✓		
4	Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh			✓		
5	Pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	✓				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
6	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	✓					
7	Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas	✓					
8	Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing			✓			
9	Izin operasional lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja dengan disabilitas		✓				
10	Izin pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta		✓				
11	Izin operasional lembaga penyedia dan penyalur Pramuwisma			✓			
12	Rekomendasi izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal		✓				
13	Rekomendasi Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah		✓				
14	Pengesahan pemakaian pesawat uap	✓					
15	Pengesahan pemakaian pesawat lift	✓					
16	Pengesahan pemakaian pesawat angkat dan angkut	✓					

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
17	Pengesahan pemakaian pesawat tenaga produksi (genset)	✓					
18	Pengesahan pemakaian instalasi listrik	✓					
19	Pengesahan pemakaian instalasi penyalur petir	✓					
20	Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran	✓					
21	Pengesahan pemakaian bejana tekan	✓					
22	Persetujuan pendirian bursa kerja khusus			✓			
23	Kartu Pencari Kerja (AK 1)				✓		
<b>L.</b>	<b>Koperasi, Serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>						
<b>M.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
1	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	✓					
2	Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	✓					
3	Izin Pembukaan Kantor Cabang Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing	✓					
<b>N.</b>	<b>Kebudayaan dan Pariwisata</b>						
1	Tanda Daftar Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami / Buatan		✓				

No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
2	Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala		✓			
3	Tanda Daftar Pengelolaan Museum		✓			
4	Tanda Daftar Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat			✓		
5	Tanda Daftar Pengelolaan Objek Ziarah			✓		
6	Tanda Daftar Kawasan Pariwisata		✓			
7	Tanda Daftar Angkutan Kereta Api Wisata		✓			
8	Tanda Daftar Angkutan Sungai dan Danau Wisata		✓			
9	Tanda Daftar Angkutan Laut Domestik Wisata	✓				
10	Tanda Daftar Angkutan Laut Internasional Wisata	✓				
11	Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata		✓			
12	Tanda Daftar Usaha Agen Perjalanan Wisata				✓	
13	Tanda Daftar Restoran/Rumah Makan/Cafe			✓		
14	Tanda Daftar Bar (Rumah Minum)			✓		
15	Tanda Daftar Pusat Penjualan Makanan (Food Court)			✓		
16	Tanda Daftar Coffee shop/Coffee House/Kedai Kopi			✓		



No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
17	Tanda Daftar Jasa Boga (Catering)			✓		
18	Tanda Daftar Kantin / Cafeteria				✓	
19	Tanda Daftar Bakery				✓	
20	Tanda Daftar Restoran Bergerak (Mobile Restaurant/Food Truck)				✓	
21	Tanda Daftar Restoran Terapung			✓		
22	Tanda Daftar Hotel Bintang	✓				
23	Tanda Daftar Hotel Melati			✓		
24	Tanda Daftar Pondok Wisata (Cottage)		✓			
25	Tanda Daftar Resort wisata		✓			
26	Tanda Daftar Motel		✓			
27	Tanda Daftar Hunian Wisata (service apartment)		✓			
28	Tanda Daftar Hotel Terapung		✓			
29	Tanda Daftar Bumi Perkemahan			✓		
30	Tanda Daftar Penginapan Remaja (Graha Wisata)			✓		
31	Tanda Daftar Wisma				✓	
32	Tanda Daftar Kolam Pemancingan				✓	
33	Tanda Daftar Pangkas Rambut (Barbershop)				✓	
34	Tanda Daftar Bioskop			✓		
35	Tanda Daftar Sanggar Seni			✓		
36	Tanda Daftar Galeri Seni			✓		
37	Tanda Daftar Gedung Pertunjukan Seni			✓		

No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
38	Tanda Daftar Permainan Ketangkasan untuk orang dewasa			✓		
39	Tanda Daftar Sarana Rekreasi Keluarga untuk anak-anak dan keluarga			✓		
40	Tanda Daftar Hiburan Kelab Malam		✓			
41	Tanda Daftar Diskotik		✓			
42	Tanda Daftar Musik Hidup		✓			
43	Tanda Daftar Pub		✓			
44	Tanda Daftar Griya Pijat			✓		
45	Tanda Daftar Panti Mandi Uap			✓		
46	Tanda Daftar Taman Margasatwa		✓			
47	Tanda Daftar Taman Rekreasi		✓			
48	Tanda Daftar Taman Bertema		✓			
49	Tanda Daftar Karaoke			✓		
50	Tanda Daftar Jasa Impresariat / Promotor		✓			
51	Tanda Daftar Pertunjukan Temporer	Asing		Lokal		
52	Tanda Daftar Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan Pameran		✓			
53	Tanda Daftar Jasa Fasilitas Teater		✓			
54	Tanda Daftar Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran (MICE)		✓			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
55	Tanda Daftar Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif		✓				
56	Tanda Daftar Jasa Informasi Pariwisata		✓				
57	Tanda Daftar Jasa Manajemen Hotel		✓				
58	Tanda Daftar Wisata Selam		✓				
59	Tanda Daftar Wisata Perahu Layar		✓				
60	Tanda Daftar Wisata Memancing				✓		
61	Tanda Daftar Wisata Selancar		✓				
62	Tanda Daftar Dermaga Bahari		✓				
63	Tanda Daftar Wisata Sungai, Danau atau Waduk untuk jenis Wisata Dayung			✓			
64	Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan Haji dan Umrah	✓					
<b>O. Kepemudaan dan Keolahragaan</b>							
1	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan	Melibatkan lebih dari satu kota/kabupaten administrasi	Melibatkan lebih dari satu kecamatan dalam satu wilayah kota/kabupaten administrasi	Melibatkan hanya satu kecamatan			
2	Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Edukasi			✓			
3	Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi			✓			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
	4	Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi			✓		
<b>P.</b>							
	1	Izin Riset/ Penelitian	Wilayah penelitian lebih dari satu wilayah kota administrasi	Wilayah penelitian dalam satu wilayah kota administrasi			
<b>Q. Perpustakaan</b>							
<b>R. Komunikasi dan Informatika</b>							
	1	Rekomendasi Penyelenggaraan Pos	✓				
	2	Rekomendasi Radio Siaran	✓				
	3	Rekomendasi Televisi Siaran	✓				
	4	Rekomendasi Administrasi dan Teknis untuk Radio/Televisi Siaran Komunitas	✓				
	5	Rekomendasi Administrasi dan Teknis untuk Radio/Televisi Siaran Swasta	✓				
	6	Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	✓				
	7	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Macrocell	✓				
	8	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell	✓				
	9	Izin Warung Telekomunikasi dan Internet				✓	

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
10	Keterangan Instalasi Genset dan Penyalur Petir pada Menara Telekomunikasi			✓			
11	Izin usaha perdagangan alat/perangkat Telekomunikasi			✓			
12	Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi		✓				
13	Surat Kelayakan Konstruksi Menara		✓				
14	Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi		✓				
15	Izin Base Tranceiver Station Mobile		✓				
<b>S.</b>	<b>Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>						
<b>T.</b>	<b>Kehutanan</b>						
	1	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	✓				
	2	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu	✓				
	3	Industri Pengolahan Kayu Lanjutan	✓				
	4	Tempat Penampungan Terdaftar	✓				
	5	Industri Pengolahan Kayu Terpadu		✓			
	6	Izin Pengedar/Penampung Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES		✓			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satiak PTSP Kecamatan	Kepala Satiak PTSP Kelurahan	
7	Rekomendasi Izin Lembaga Konservasi		✓				
8	Rekomendasi Izin Penggunaan Kawasan Hutan	✓					
9	Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	✓					
10	Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Non Komersial	✓					
<b>U. Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
1	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	✓					
2	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	✓					
3	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri	✓					
4	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Liquid Propane Gas	✓					
5	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan	✓					
6	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker	✓					
7	Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mobile Refueling	✓					

No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
8	Izin Usaha Depo Lokal	✓				
9	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Asing Bidang Minyak dan Gas	✓				
10	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas	✓				
11	Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik (Genset)	✓				
12	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	✓				
13	Tanda Daftar Penyediaan Tenaga Listrik (Genset)		✓			
14	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	✓				
15	Izin Usaha Agen LPG dan Minyak Tanah		✓			
16	Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Pemasangan Peralatan dan Instalasi SPBU/SPBG/SPBLPG	✓				
17	Rekomendasi Pengujian Tangki dan Jalur Pipa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	✓				
18	Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset)	✓				
<b>V. Kelautan dan Perikanan</b>						
1	Izin Penangkapan Ikan 5-30 GT		✓			
2	Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan > 30 GT	✓				

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
3	Izin Kapal Pengangkut Ikan < 30 GT				✓		
4	Izin Penangkapan Ikan Andon	✓					
5	Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)			✓			
6	Rekomendasi Impor Hasil Perikanan			✓			
7	Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan			✓			
8	Izin Usaha Perikanan Budidaya			✓			
9	Izin Usaha Penangkapan Ikan			✓			
10	Rekomendasi Impor Ikan Hias dan Tanaman Air	✓					
11	Rekomendasi Impor Benih Ikan	✓					
12	Rekomendasi Impor Pakan dan Obat Ikan	✓					
13	Rekomendasi Impor Induk Ikan	✓					
14	Rekomendasi Impor Ikan Hidup	✓					
15	Tanda Pencatatan Kapal Penangkap Ikan <5 GT			✓			
16	Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Ikan >30 GT	✓					
<b>W.</b>	<b>Peternakan</b>						
1	Izin Praktik Dokter Hewan (Praktik Perorangan)			✓			
2	Izin Praktik Dokter Hewan (di Fasilitas Kesehatan)			✓			



No	Bidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
4	Izin Distributor Obat Hewan		✓			
5	Rekomendasi Izin Usaha sebagai Importir, Produsen dan Eksportir Obat Hewan		✓			
6	Izin Tempat Sementara Penampungan Hewan	✓				
7	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara	✓				
8	Izin Pemasukan Ternak		✓			
9	Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Eksotik dari/ke luar negeri	✓				
10	Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Unggas dari/ke luar negeri	✓				
11	Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan kesayangan, unggas dan eksotik	✓				
12	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	✓				
13	Izin Depo Obat Hewan			✓		
14	Izin Petshop			✓		
15	Izin Toko Obat Hewan			✓		
16	Izin Pemasukan/Pengeluaran Daging	✓				
17	Izin Distributor Daging		✓			
18	Izin Toko Daging/ Swalayan yang menjual daging			✓		

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
19	Izin Usaha Pengolahan Daging			✓			
20	Kartu Tanda Berjualan Daging			✓			
21	Izin Usaha Pemotongan Ternak		✓				
22	Izin Pengangkutan Daging		✓				
23	Izin Usaha Persusuan			✓			
24	Rekomendasi Impor Produk Hewan	✓					
25	Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	✓					
26	Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan Sementara	✓					
27	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner	✓					
28	Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan	✓					
29	Rekomendasi Impor Bahan Baku Pakan Ternak	✓					
30	Rekomendasi Impor Pakan Hewan Kesayangan	✓					
31	Rekomendasi Usaha Pengolahan Tulang dan Bulu Ayam	✓					
32	Rekomendasi Instalasi Karantina Pakan Hewan Sementara	✓					
33	Izin Distributor Pakan Hewan Kesayangan		✓				
34	Izin Pemasukan Produk Hewan		✓				
35	Izin Pengeluaran Produk		✓				

No	Sidang / Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satiak PTSP Kecamatan	Kepala Satiak PTSP Kelurahan	
<b>X.</b>	<b>Perdagangan</b>					
1	Izin Usaha Perdagangan Besar		✓			
2	Izin Usaha Perdagangan Menengah		✓			
3	Izin Usaha Perdagangan Kecil			✓		
4	Izin Usaha Perdagangan Mikro				✓	
5	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer		✓			
6	Tanda Daftar Perusahaan		✓			
7	Tanda Daftar Gudang		✓			
8	Angka Pengenal Importir	✓				
9	Surat Keterangan Asal		✓			
10	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba		✓			
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba Lanjutan		✓			
12	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba		✓			
13	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba Lanjutan		✓			
14	Izin Usaha Toko Swalayan untuk Minimarket			✓		
15	Izin Usaha Toko Swalayan untuk Supermarket		✓			
..	Izin Usaha Toko Swalayan					

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
17	Izin Usaha Toko Swalayan untuk Perkulakan	✓					
18	Izin Usaha Toko Swalayan untuk Department Store		✓				
19	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pertokoan		✓				
20	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pusat Perdagangan	✓					
21	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Mall	✓					
22	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Plaza	✓					
23	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Untuk Pengelolaan Pasar Tradisional	✓					
24	Izin Usaha Rumah Tangga				✓		
25	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)				✓		
<b>Y.</b>	<b>Perindustrian</b>						
1	Izin Usaha Industri Besar			Nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) > Rp 10 milyar			
2	Izin Usaha Industri Menengah			Nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan): Rp 200 juta - Rp 10 milyar			
3	Tanda Daftar Industri			Nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan): Rp 5 juta - <Rp 200 juta			

No	Bidang / Jenis		Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
			Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Kelurahan	
	4	Persetujuan Prinsip Industri untuk Industri di Luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat	✓				
<b>Z.</b>	<b>Pembangunan</b>						
	1	Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas A	Industri & non industri gangguan besar				
	2	Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas B		Industri & non industri gangguan sedang			
	3	Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas C			Industri gangguan kecil		
	4	Izin Gangguan - Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan Kelas D				Non Industri gangguan kecil	
	5	Sertifikat Keselamatan Kebakaran	Bangunan > 8 lantai	Bangunan ≤ 8 lantai			
	6	Rekomendasi Keselamatan Kebakaran	✓				
	7	Izin Perubahan Potensi Bahaya Kebakaran	✓				
	8	Izin Instalatur Peralatan Proteksi Kebakaran	✓				
	9	Izin Instalasi Sistem Proteksi Kebakaran	✓				
	10	Izin Produsen Peralatan Proteksi Kebakaran	✓				

No	Bidang/Jenis	Cakupan Kewenangan Penandatanganan				Keterangan
		Kepala BPTSP	Kepala KPTSP	Kepala Satlak PTSP Kecamatan	Kepala Satlak PTSP Keurahan	
11	Izin Distributor Peralatan Proteksi Kebakaran		✓			
12	Izin Produk Peralatan Proteksi Kebakaran	✓				
13	Tanda Daftar Keahlian Keselamatan Kebakaran		✓			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA